



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI  
KE PROVINSI JAWA TIMUR  
PADA MASA RESES DI MASA PERSIDANGAN II  
TAHUN SIDANG 2023-2024**

---

**A. PENDAHULUAN**

**I. Dasar Kunjungan Kerja**

- a. Hasil Rapat Koordinasi di antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Pimpinan Komisi I s.d. XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- b. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- c. Pasal 98 ayat (4) huruf f UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Pasal 210 ayat (2) Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

**II. Ruang Lingkup**

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-undangan, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Keamanan.

**III. Susunan Tim**

NO	NAMA	KETERANGAN
1	DR. IR. H. ADIES KADIR, SH., M.HUM.	KETUA TIM / WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI / F-P. Golkar
2	DRS. M. NURDIN, M.M.	ANGGOTA TIM / F-P. PDI PERJUANGAN
3	ICHSAN SOELISTIO	ANGGOTA TIM / F-P. PDI PERJUANGAN
4	H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.	ANGGOTA TIM / F-P. PDI PERJUANGAN

5	JOHAN BUDI SAPTO PRIBOWO	ANGGOTA TIM / F-P. PDI PERJUANGAN
6	DR. HJ. ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.SOS., M.SI.	ANGGOTA TIM / F-P. GOLKAR
7	SUPRIANSA, S.H., M.H.	ANGGOTA TIM / F-P. GOLKAR
8	DR. WIHADI WIYANTO, S.H., M.H.	ANGGOTA TIM / F-P. GERINDRA
9	BIMANTORO WIYONO, S.H.	ANGGOTA TIM / F-P. GERINDRA
10	H. RAHMAT MUHAJIRIN, S.H.	ANGGOTA TIM / F-P. GERINDRA
11	AHMAD H.M. ALI, S.E.	ANGGOTA TIM / F-P. NASDEM
12	DRS. Y. JACKY ULU, M.H.	ANGGOTA TIM / F-P. NASDEM
13	DR. H. JAZILUL FAWAID, S.Q., M.A.	ANGGOTA TIM / F-PKB
14	N. M. DIPO NUSANTARA PUA UPA, SH., M.KN.	ANGGOTA TIM / F-PKB
15	DR. DIDIK MUKRIANTO, S.H., M.H.	ANGGOTA TIM / F-P. DEMOKRAT
16	DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.	ANGGOTA TIM / F-P. DEMOKRAT
17	DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI.	ANGGOTA TIM / F-PKS
18	DR. SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.	ANGGOTA TIM / F-PAN
19	H. ACHMAD BAIDOWI, S.SOS, M.SI.	ANGGOTA TIM / F-PPP

Dalam tim kunjungan kerja tersebut juga didampingi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kepala Kejaksaan Negeri se Jawa Timur, Ketua Pengadilan Negeri se Jawa Timur, Pengadilan Agama se Jawa Timur, dan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara se Jawa Timur.

#### **IV. Pelaksanaan dan Objek Kunjungan Kerja**

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan pada tanggal 8-12 Desember 2023 di Provinsi Jawa Timur. Adapun pelaksanaan Kunjungan Kerja tersebut dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan:

1. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur
2. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur
3. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur
4. Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya
6. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya
7. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

## **B. HASIL KUNJUNGAN KERJA**

### **I. PENJELASAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR**

#### **1. BIDANG ANGGARAN**

- **Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023**

Pada tahun 2023, Kejaksaan RI Wilayah Jawa Timur memiliki pagu anggaran sebesar Rp492.521.220.000 dengan realisasi sebesar Rp469.597.828.398 (95,35%).

- **Kebutuhan Anggaran Tahun 2023**

- Kendaraan tahanan membutuhkan peremajaan berdasarkan kondisi riil fisik kendaraan tahanan (rusak berat) hampir di seluruh satuan kerja. Hal ini sangat mendesak untuk dipenuhi agar Kejaksaan dapat selalu menjalankan prosedur penanganan tahanan secara berkualitas dan representatif.
- Perangkat alat informasi teknologi dan pengolah data untuk mendukung digitalisasi kejaksaan dan modernisasi penanganan perkara.
- Revitalisasi gedung perkantoran Kejaksaan Negeri dengan meninjau banyak bangunan lama yang membutuhkan renovasi bahkan pembangunan ulang untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkantoran dalam rangka mendukung pelayanan di bidang hukum yang optimal.
- Pembangunan dan renovasi rumah dinas bagi pejabat maupun pegawai di seluruh satuan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tempat tinggal menjadi salah satu kebutuhan tak terelakkan karena mutasi dan rotasi pegawai di Kejaksaan berasal dari seluruh daerah di Indonesia.

#### **2. BIDANG PENGAWASAN**

- **Tindak Pidana Khusus**

- Dalam hal responsivitas dan efisiensi penanganan perkara tindak pidana Korupsi, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada tahun 2023 menerima laporan pengaduan masyarakat sebanyak 137 laporan.
  - Ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat perintah tugas sebanyak 52 lapdumas.
  - Diserahkan penanganannya ke Kejaksaan Negeri sebanyak 71 laporan.
  - Diserahkan penanganannya untuk ditindaklanjuti oleh Instansi berwenang lain sebanyak 7 laporan.
  - Ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan sebanyak 7 laporan.

- Efektivitas penanganan perkara tindak Pidana Khusus dengan melakukan upaya pemulihan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap berupa:
  - Penyelesaian uang pengganti sebesar Rp47.714.951.202 dengan rincian disetor ke kas negara sebesar Rp8.272.326.524.
  - Dilakukan penghapusan tunggakan uang pengganti sebesar Rp39.335.782.255 karena terpidana telah menjalani pidana subsidiair.
  
- Denda dalam perkara tindak pidana korupsi yang telah disetorkan ke kas negara sebesar Rp1.275.735.045.
  
- Pra Penuntutan Tahun 2023:
  - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
    - 1) Tindak Pidana Korupsi tahap Pra Penuntutan yang berasal dari penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sejumlah 10 perkara.
    - 2) Tindak Pidana Korupsi tahap Pra Penuntutan yang berasal dari penyidik Polda Jawa Timur sejumlah 13 perkara.
    - 3) Tindak pidana perkara perpajakan tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sejumlah 10 perkara.
    - 4) Tindak pidana perkara Kepabeanan dan Cukai tahap Pra penuntutan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sejumlah 6 Perkara.
  
- Penuntutan Tahun 2023:
  - Perkara tindak pidana korupsi tahap Penuntutan se Jawa Timur sebanyak 124 perkara.
  - Perkara tindak pidana perpajakan tahap Penuntutan se Jawa Timur sebanyak 7 perkara.
  - Perkara tindak pidana Kepabeanan dan Cukai tahap Penuntutan se Jawa Timur sebanyak 33 perkara.
  
- Eksekusi Tahun 2023:
  - Eksekusi badan perkara Tipikor sebanyak 126 perkara.
  - Eksekusi badan perkara TPKL TPPU sebanyak 32 perkara.
  - Penyelamatan keuangan negara berupa:
    - 1) Uang pengganti sebesar Rp47.714.951.202.
    - 2) Melakukan penagihan untuk pembayaran uang pengganti sebesar Rp8.272.326.524.

3) Menjalani pidana penjara subsidiar uang pengganti sebesar Rp39.335.782.255 dengan denda sebesar Rp1.275.735.045.

- **Tindak Pidana Umum**

Data penanganan perkara tindak pidana umum pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur periode Januari sampai dengan November 2023 sebagai berikut:

- SPDP yang diterima dan ditindaklanjuti dengan penerbitan P-16 sebanyak 16.474 perkara.
- SPDP yang dikembalikan kepada penyidik karena tidak ditindaklanjuti dengan pengiriman berkas perkara atau karena diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) sebanyak 2.536 perkara.
- Penerimaan berkas perkara tindak pidana umum sebanyak 14.572 berkas perkara.
- Berkas perkara yang dinyatakan belum lengkap dan diberi petunjuk untuk dilengkapi (P-18 dan P-19) sebanyak 2.631 berkas perkara.
- Berkas perkara yang dinyatakan lengkap (P-21) sebanyak 12.772 berkas perkara.
- Berkas perkara yang tidak ditindaklanjuti dengan pengiriman tersangka dan barang bukti (tahap 2) dan dikembalikan kepada Penyidik sebanyak 214 perkara.
- Berkas perkara yang ditindaklanjuti dengan penyerahan tersangka dan barang bukti sebanyak 13.233 perkara.
- Perkara yang dilimpahkan dengan Acara Pemeriksaan Biasa (APB) sebanyak 12.489 perkara.
- Perkara yang telah dilaksanakan eksekusi sebanyak 11.766 perkara.
- Perkara yang masih dalam proses upaya hukum sebanyak 865 perkara.

- **Kendala dalam Penanganan Perkara**

- Masih adanya berkas perkara bolak-balik dari Penyidik kepada Penuntut Umum.
- Wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur belum ada RUTAN khusus bagi tahanan Kejaksaan.
- Terpidana mati yang belum dapat dilaksanakan eksekusi oleh Jaksa dikarenakan terpidana mati tersebut belum mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali atau Upaya Grasi.

- **Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)**

Pada periode Januari 2023 sampai dengan November 2023 Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebanyak 292 (dua ratus sembilan puluh dua) perkara. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berpedoman pada Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sejak tahun 2022 sampai dengan November 2023, Jumlah Rumah Restorative Justice yang telah diresmikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebanyak 1.739 yang tersebar di seluruh kota dan kabupaten di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Rumah Restorative Justice tersebut didirikan di lingkungan sekolah, universitas, desa/kelurahan, perkantoran, pesantren dan ada pula yang didirikan di Mall Pelayanan Publik.

Selain melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga menerapkan keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba. Pada periode Januari 2023 sampai dengan November 2023 Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah melakukan rehabilitasi terhadap tersangka yang merupakan pecandu, atau korban penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan keadilan restoratif sebanyak 33 perkara.

Sejak tahun 2022 sampai dengan November 2023, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah meresmikan 25 Balai Rehabilitasi Narkoba Adhyaksa dan menjadi satker percontohan dalam kegiatan studi banding yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi lain diantaranya Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang bekerjasama dengan Pemerintahan Provinsi Papua Barat terkait pendirian Balai Rehabilitasi Narkoba Adhyaksa dan penanganan perkara narkoba melalui pendekatan rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalah guna narkoba rehabilitasi melalui pendekatan keadilan restoratif.

## **II. PENJELASAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR**

### **A. ANGGARAN POLDA JAWA TIMUR TAHUN 2023**

Jumlah pagu anggaran yang diterima Polda Jatim pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 5.306.223.901.000 (Pagu Awal). Kemudian terdapat perubahan besaran anggaran per-4 Desember 2023 menjadi Rp. 5.582.064.284.000 pada sumber anggaran :

1. Sumber anggaran rupiah murni terdapat pengurangan sebesar Rp. 2.368.982.000 dari pagu awal Rp. 4.510.660.748.000 menjadi Rp. 4.508.291.766.000 dikarenakan pada kegiatan penerimaan anggota Polri (giat rapid tes, prokes dan pengurangan jumlah siswa SPN) pada Satker SDM dan SPN Polda Jatim;
2. Sumber PNBP mengalami kenaikan sebesar Rp. 535.439.000 dari pagu awal sebesar Rp. 289.940.546.000 menjadi Rp. 290.475.985.000 dikarenakan adanya kenaikan iuran dana kapitasi BPJS pada Satker Biddokkes Polda Jatim;
3. Sumber BLU mengalami kenaikan sebesar Rp. 224.083.396.000 dari pagu awal Rp. 498.369.500.000 menjadi Rp. 722.452.896.000 karena mengalami kenaikan pada target pendapatan pada Rumah Sakit BLU jajaran Polda Jatim;
4. Sumber hibah sebesar Rp. 53.590.530.000 dari Pemprov/Pemkab/Pemkot di wilayah Jawa Timur.

Dari 5 program pagu anggaran yang diterima tahun 2022 dibandingkan tahun 2023, terdapat 2 program yang mengalami penurunan yaitu Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana senilai Rp 142.148.583.000,- dan Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri turun senilai Rp 110.314.587.000,-.

## **B. DUKUNGAN ANGGARAN YANG DIBUTUHKAN**

Adapun penambahan anggaran untuk kebutuhan kegiatan dimaksud berdasarkan

1. Kegiatan sidik Polda Jatim TA 2023:
  - a. Jumlah kasus yang meningkat sehingga kebutuhan makan dan perawatan tahanan juga meningkat;
  - b. Kekurangan sebesar Rp. 11.700.000.000 telah dipenuhi dari anggaran dana Samsat Polda Jatim tahun 2023;
  - c. Kebutuhan anggaran kegiatan lidik sidik, makan dan perawatan tahanan sebesar Rp. 161.581.307.000 dapat dipenuhi dalam alokasi DIPA RKA KL Polda Jatim TA 2025.
2. Belanja daya dan jasa listrik Polda Jatim TA 2023:
  - a. Banyak penambahan/renovasi gedung dan bangunan baru pada Satker jajaran Polda Jatim; Pada saat pembangunan gedung baru alokasi anggaran listrik belum diperhitungkan dalam tahun anggaran berjalan sehingga mengalami kekurangan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000;

- b. Kekurangan sebesar Rp. 10.000.000.000 akan menjadi beban DIPA RKA KL Polda Jatim TA 2024;
  - c. Kebutuhan anggaran listrik sebesar Rp. Rp. 69.037.871.000 dapat dipenuhi dalam alokasi DIPA RKA KL Polda Jatim TA 2025.
3. Operasi Mantap Brata Polda Jatim TA 2023 :
- a. Adanya penebalan jumlah personel yang dilibatkan pada tahap Kampanye berdasarkan kirka intel;
  - b. Kekurangan anggaran sebesar Rp. 11.459.292.000 dipenuhi dari anggaran khusus berdasarkan direktif Kapolri TA 2023

**C. UPAYA POLDA JATIM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI TAHUN 2023.**

1. Penyebaran berita bohong di Pakel Banyuwangi ; Konflik di Desa PaKel, Kec. Licin, Kab. Banyuwangi antara warga dengan karyawan PT. Bumisari pada tahun 2018 disebabkan berita bohong.
2. Pembunuhan korban a.n. Dini Sera Afrianti ; Pada tanggal 3 Oktober 2023 diduga pacarnya tersangka Greogorius Ronald Tannur melakukan kekerasan fisik dengan mendorong dan menendang serta melindas korban hingga terseret kedepan sejauh 5 meter.
3. Meninggal dunia 11 korban laka kereta api di Lumajang ; Pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 telah terjadi Kecelakaan kereta api tanpa palang pintu di Desa Ranu Pakis Kec. Klakah Kab. Lumajang yang mengakibatkan 11 orang meninggal dunia sesuai laporan polisi nomor : A/639/XI/2023. Penyidik telah menetapkan 1 orang tersangka a.n. Bayu Trinanto dan saat ini berkas perkara masih dalam penelitian JPU.
4. Kebakaran lahan konservasi Gunung Bromo; Gunung Bromo yang terletak di kawasan kaldera TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) mendadak viral bukan karena keindahannya namun karena kebakaran yang terjadi akibat percikan api dari flare yang digunakan oleh pengunjung saat melakukan prewedding pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 berlokasi di seputaran Bukit Teletubbies Gunung Bromo yang mengakibatkan lahan terbakar sekitar 274,71 ha di areal TNBTS.
5. Penanganan khusus tindak pidana korupsi ; Dalam penanganan kasus korupsi di tahun 2023 dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 330.396.387.656,- dengan jumlah tersangka 33 orang, Polda Jawa Timur berhasil menyelamatkan aset negara sebesar Rp. 104.753.068.049,-. Dalam pelaksanaan pengembalian aset negara ini, penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim masih menerapkan undang-undang korupsi untuk menjerat para pelaku tindak pidana korupsi (tindak pidana asal) dan akan menerapkan tracing asset kepada para pelaku untuk



selanjutnya dipersangkakan dengan undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk memaksimalkan pengembalian aset negara.

6. Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam dan tracing asset pengungkapan kasus Korupsi sebagai berikut :
  - a. Kebijakan pemerintah dalam penanganan tindak pidana korupsi yang mengedepankan upaya pencegahan dan pemulihan kerugian keuangan negara dalam bentuk recovery asset dan tracing asset.
  - b. Perubahan strategi dalam penanganan perkara korupsi baik lidik maupun sidik secara selektif dan akuntabel melalui kegiatan pencegahan sesuai dengan kebijakan pemerintah dan arahan Kapolri melalui kegiatan deteksi, aksi pencegahan dan monitoring.
  - c. Dalam membangun case building perlu waktu karena penghitungan kerugian keuangan negara bergantung cepat atau tidaknya hasil audit oleh BPK/BPKP.
  - d. Kegamangan penegakan hukum di tahun politik terhadap penanganan perkara yang melibatkan peserta pemilu/parpol sehingga Polri tidak dijadikan alat politik (menjaga netralitas).
  - e. Dalam penegakan hukum perkara korupsi, recovery asset dan tracing asset dengan penerapan UU TPPU dan subyek hukum korporasi membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan LHA dari PPATK.
7. Penanganan kasus tindak pidana Narkotika; Tindak pidana Narkotika merupakan extra ordinary crime dan tergolong dalam Organize Crime serta Transnational Crime yang dalam proses terjadinya tindak pidana melibatkan jaringan besar yang terorganisir, baik jaringan yang ada di dalam negeri maupun luar negeri sebagai distributor narkotika. Pemberantasan tindak pidana Narkotika ini dianggap penting karena jika semakin banyak generasi muda yang menjadi penyalahguna kotika, maka masa depan negara kita akan menjadi terancam. Berdasarkan perbandingan jumlah kasus Narkotika yang terjadi di Polda Jawa Timur di tahun 2022 sebanyak 7.008 kasus dibandingkan tahun 2023 sebanyak 4.806 kasus, mengalami penurunan sebesar 31,42 %. Ditresnarkoba Polda Jatim dan Polres/ta/tabes jajaran juga berpartisipasi aktif dalam pengungkapan jaringan pelaku tindak pidana Narkotika Nasional maupun Internasional termasuk ikut berpartisipasi dalam pengungkapan narkotika yang dikendalikan oleh Fredy Pratama bersama dengan penyidik Dit Tipid IV Bareskrim Polri. Berdasarkan hasil anev dari Bareskrim Polri tahun 2023 Polda Jatim menduduki peringkat kedua nasional dengan hasil ungkap sebanyak 4.806 kasus dari 34 Polda dan Dit Tipid IV Bareskrim Polri, dengan peringkat pertama Polda Metro Jaya dan peringkat ketiga Polda Sumut. Untuk pengungkapan perkara tindak pidana narkotika terjadi penurunan sebesar 31,42% pada tahun 2023.

8. Penanganan kasus tindak pidana Perdagangan Orang ; Berdasarkan hasil Analisa perbandingan tahun 2022 dengan 2023 terdapat 3 klasifikasi Modus besar dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:
- a. Pelanggaran terhadap Moratorium Kepmenaker Nomor 260 tahun 2015 tentang pelarangan pemberangkatan PMI ke 19 negara di Uni Emirate Arab (UEA);
  - b. Eksploitasi Pemberangkatan ke Luar Negeri tanpa disertai kompetensi;
  - c. Eksploitasi seksual dalam Negeri.

Dari ketiga modus tersebut di atas yang mampu mendongkrak profit paling banyak bagi pelaku TPPO adalah tentang Pelanggaran terhadap Moratorium Ksorrenaker Nomor 260 tahun 2015 tentang pelarangan pemberangkatan PMI ke 19 negara di Uni Emirate Arab (UEA). Hal ini dikarenakan pemberangkatan CPMI ke wilayah Kawasan Timur Tengah, pelaku TPPO ini mendapatkan fee sebesar kurang lebih 3500 USD atau setara dengan 50 juta rupiah per orang. Sehingga dalam menjalankan TPPO pemberangkatan ke Kawasan Timur Tengah ini sangat terorganisir dan menggunakan pembagian tugas dari proses perekrutan, penampungan sampai pemberangkatan di Bandara.

Dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini tentunya Polri tidak dapat berdiri sendiri, perlu adanya peran serta Kemenaker, BP2MI, para pelaku usaha P3MI, Kemenlu, Ditjen Imigrasi Kemenkumham, BLK untuk duduk bersama dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi seperti:

- a. Terhadap modus pemberangkatan pelarangan Moratorium.
- b. Terhadap modus Eksploitasi Pemberangkatan ke Luar Negeri tanpa disertai kompetensi.
- c. Terhadap modus Eksploitasi seksual dalam Negeri. Regulasi untuk menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai modus ketiga ini satu satunya adalah penegakan hukum. Karena ini merupakan wujud nyata dari Tindak Pidana Perdagangan Orang yang di eksploitasi di dalam negeri yang terjadi karena niat jahat (Mens Rea) para pelaku TPPO, bukan karena ada ketimpangan regulasi seperti pada modus pertama dan kedua.

Dalam penanganan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang modus pertama dan kedua, penegakan hukum menjadi jalan terakhir yang digunakan (Ultimum Remedium) dalam proses penegakan hukumnya dengan mempertimbangkan kondisi CPMI yang memang ingin bekerja di luar negeri untuk memperbaiki nasib. Tentunya hal ini berbeda dengan modus ketiga, penegakan hukum menjadi jalan utama untuk memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang pada perkara ini (Primum Remedium). Hal ini diartikan sebagai hukum pidana yang diberlakukan sebagai pilihan

utama, hukum pidana sebagai alat utama dalam penegakan hukum, bukan lagi menjadi obat terakhir melainkan obat pertama untuk membuat jera pelaku yang melakukan pidana khususnya Tindak Pidana Perdagangan Orang modus ketiga ini.

Adapun dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penyidik mengalami problematika hukum, yaitu :

- a. Tempat kejadian perkara berada di luar Negeri;
  - b. Korban berada di Luar Negeri, sehingga penyidik kesulitan untuk mendapatkan keterangan;
  - c. Tidak lengkapnya alat bukti maupun petunjuk, karena pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan jaringan terputus, sehingga penyidik mengalami hambatan dalam proses penegakan hukumnya;
  - d. Identitas dan data korban dipalsukan oleh pelaku;
  - e. Korban tidak kooperatif dan tidak berani memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik pada saat pemeriksaan, karena korban diancam oleh pelaku apabila memberikan keterangan sebenarnya disuruh mengembalikan uang tip (uang ganti untuk Keluarga).
9. Penanganan kasus tindak pidana Pencucian Uang ; Berdasarkan perbandingan jumlah kasus TPPU yang terjadi di Polda Jawa Timur di tahun 2022 dibandingkan tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak 4 kasus dari 18 kasus naik menjadi 22 kasus.

#### **D. PERSIAPAN PENANGANAN PEMILU SERENTAK 2024**

Pada pelaksanaan Pemilu 2024 dengan mempertimbangkan kondisi geografis provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 47.156, 72 km<sup>2</sup> terdiri dari 90% daratan dan 10% perairan yang terdiri dari 229 pulau (162 pulau bernama dan 67 pulau tanpa nama), sesuai dengan data KPU provinsi Jawa Timur terdapat jumlah pemilih tetap 31.402.838. Personel yang dilibatkan dalam pengamanan sebanyak 25.843 personel dengan rincian petugas pengamanan TPS sejumlah 17.022 personel (jumlah TPS 120.666 yang tersebar di 38 Kab/Kota, 666 Kecamatan dan 8.494 Desa/Kelurahan) dan pengamanan kantor penyelenggara pemilu, kantor parpol peserta pemilu dan lain-lain sebanyak 8.821 personel.

Cara bertindak dalam melakukan pengamanan pemilu 2024 meliputi kegiatan deteksi dini, melaksanakan bimbingan, penyuluhan atau penerangan kepada masyarakat, melaksanakan pengamanan pada setiap tahapan pemilu dengan kegiatan penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, melaksanakan penegakan hukum terkait dampak dari kegiatan tahapan pemilu, melakukan monitoring, pemetaan, profiling dan penindakan

terhadap munculnya aksi terror, melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi maupun counter opini berita negative.

Daerah operasi pengamanan meliputi seluruh wilayah hukum Polda Jatim berdasarkan penilaian Indeks Potensi Kerawanan Pemilu (IPKP) BIK Polri periode ketiga (Agustus 2023) masuk kategori rawan, terbagi menjadi 3 kategori prioritas:

- Prioritas 1 (kategori sangat rawan) ada 4 Kabupaten yaitu Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan dan Kab. Sumenep.
- Prioritas 2 (kategori rawan) ada 21 Kab/Kota yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Malang, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Madiun dan Kota Madiun,
- Prioritas 3 (kategori kurang rawan) ada 13 Kab/Kota yaitu Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Nganjuk, Kota Kediri, Kota Batu, Kabupaten Kediri, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Blitar, Kota Malang, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Banyuwangi.

Kegiatan harkamtibmas yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur dalam rangka menjaga kondisi masyarakat yang kondusif merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pemilu damai. Upaya yang dilakukan dalam menjaga Harkamtibmas menjelang Pemilu 2024 di wilayah provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:

1. Pembongkaran keberadaan tugu-tugu beratribut perguruan silat yang menjadi salah satu faktor pemicu konflik antar perguruan silat. Di wilayah provinsi Jawa Timur terdapat 4.484 tugu beratribut perguruan silat dengan rincian 3.025 tugu dibangun di atas tanah negara, 1.459 tugu dibangun di atas tanah hak/pribadi, 856 telah dibongkar/alih fungsi dan sisanya sejumlah 3.628 tugu masih berdiri;
2. Melaksanakan patroli gabungan skala besar bersama TNI dan Satpol PP yang dilaksanakan oleh Polda Jawa Timur beserta jajaran sebagai bentuk upaya preventif memelihara dan mempertahankan situasi kamtibmas untuk mencegah segala bentuk tindak kejahatan (khususnya street crime);
3. Melaksanakan kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan melalui penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan (street crime) dan penyakit masyarakat; Melaksanakan
4. Mengedepankan fungsi intelijen dengan bentuk kegiatan berupa pemetaan dan identifikasi terhadap potensi ancaman dan gangguan pada setiap tahapan Pemilu 2023-2024;

5. Mengedepankan peran Bhabinkamtibmas dengan melibatkan Babinsa serta tokoh masyarakat dalam melaksanakan edukasi dalam rangka memberikan pemahaman terhadap semua ketentuan dan aturan pemilu;
6. Mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas dan Pamswakarsa (Satpam dan Satkamling) untuk mengajak masyarakat dalam partisipasi aktif menjaga Sitkamtibmas yang kondusif disetiap tahapan Pemilu Tahun 2024;
7. Melakukan pengamanan dan sterilisasi di area perkantoran penyelenggara pemilu guna pencegahan terjadinya penyusupan maupun gangguan keamanan di ring 1 dan ring 2 untuk mendukung kelancaran tugas penyelenggara pemilu;
8. Mengedepankan fungsi lalu lintas untuk melaksanakan pengaturan dan penjagaan lalu lintas guna mengurangi kepadatan dan kemacetan lalu lintas menuju objek kegiatan terkait pemilu;
9. Mengedepankan fungsi Brimob untuk melakukan penanggulangan dan pengendalian unjuk rasa atau huru hara dan konflik sosial yang berkaitan dengan pemilu, melaksanakan penanganan pengunjung rasa dalam situasi damai/tertib dengan memedomani Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru-Hara dan nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian;
10. Pada saat terjadinya kontijensi dan situasi kedaruratan melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan dalam membantu dan mengevakuasi korban Kecelakaan, akibat bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia khususnya dalam bidang SAR, melaksanakan koordinasi dengan TNI, BNPB/BPBD dan Basarnas/Basarda untuk pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana pada tahapan Pemilu.
11. Melakukan patroli di media sosial dan online guna melihat isu dan pemberitaan yang berkembang terkait Pemilu, mengumpulkan data informasi serta mengolah guna mencegah isu serta pemberitaan negatif dan melakukan penegakan hukum cyber crime pelaksanaan Pemilu.
12. Mengumpulkan data, informasi dan bukti-bukti terkait terjadinya tindak pidana diluar Pemilu yaitu tindak pidana yang terjadi sebagai akibat penyelenggaraan Pemilu.
13. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan penerangan umum untuk membentuk opini publik yang positif melalui media mainstream (cetak dan elektronik).

#### **E. Penegakan Hukum Terpadu.**

Pelaksanaan Pemilu 2024 di wilayah provinsi Jawa Timur telah dibentuk 39 sentra Gakkumdu yang terdiri dari 1 sentra Gakkumdu Provinsi dan 38 sentra Gakkumdu Kab/Kota. Personel Gakkumdu Provinsi berjumlah 30 personel terdiri dari 15 personel Bawaslu, 9 penyidik Polri dan 6 dari unsur Jaksa, sedangkan untuk mengawaki 38

Gakkumdu Kab/Kota telah disiapkan 684 personel terdiri dari 228 pers Bawaslu Kab/Kota, 342 penyidik Polri dan 114 dari unsur Jaksa.

Dalam hal penguatan kompetensi SDM penyidik Polri yang tergabung dalam Gakkumdu mendasari ketentuan pasal 478 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu sebanyak 351 penyidik Polri yang tergabung dalam sentra Gakkumdu provinsi/Kab/Kota telah memiliki sertifikat kompetensi dan memenuhi persyaratan sebagai penyidik khusus tindak pidana Pemilu melalui pelatihan khusus yang diselenggarakan oleh Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri).

Polda Jawa Timur berkomitmen untuk tetap netral dalam kontestasi Pemilu 2024, hal itu untuk memberi pengamanan dan memastikan pemilu 2024 berjalan aman dan sukses. Netralitas menjadi pegangan bagi seluruh anggota Polri untuk tidak memihak kepada partai politik manapun, netralitas anggota Polri sudah diatur dalam peraturan sebagai berikut :

1. UU 2/2002 tentang Kepolisian (Psl 28 : Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, tidak menggunakan hak memilih dan dipilih, dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Polri);
2. Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi & Komisi Kode Etik Polri Etika Kenegaraan (Pasal 4 huruf h: Setiap pejabat Polri dalam etika kenegaraan wajib bersikap netral dalam kehidupan politik. Pasal 9 huruf d, e, f: Setiap pejabat Polri dalam etika kenegaraan dilarang, menjadi anggota atau pengurus partai politik, menggunakan hak memilih dan dipilih; dan/atau melibatkan diri pada kegiatan politik praktis);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Pasal 494 Jo. Pasal 280 ayat 3 sanksi pidana bagi anggota Polri yang terbukti menjadi pelaksana dan tim kampanye).

### **III. PENJELASAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR**

#### **1. BIDANG ANGGARAN**

- **Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023**

Pagu anggaran Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dan jajaran tahun 2023 sebesar Rp832.814.275.000 dengan realisasi sebesar Rp761.459.710.533 (91,43%).

- **Pagu Anggaran Tahun 2024**

Pagu anggaran Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dan jajaran tahun 2024 direncanakan sebesar Rp883.735.871.000, dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp281.914.939.000, Belanja Barang sebesar Rp444.340.679.000, dan Belanja Modal sebesar Rp157.480.253.000.

- **Kebutuhan Anggaran**

- Revitalisasi 14 Satker Pas.
- Pembelian Rumdin Imigrasi Madiun.
- Renovasi 8 Rumdin Pejabat Eselon III Kanwil.
- Sarana dan Prasarana Tambahan untuk Kanwil.
- Tata Ulang Jaringan Listrik 10 Satker Pas.

## 2. BIDANG PENGAWASAN

- **PEMASYARAKATAN**

- Kondisi Aktual Lapas/Rutan  
Kapasitas hunian Lapas/Rutan di Provinsi Jawa Timur mengalami *overcapacity* sebesar 105% atau sebanyak 13.563 orang dari 27.875 orang, dengan rincian jumlah tahanan dan narapidana di Provinsi Jawa Timur sebanyak 27.865 orang.
- Penanganan *Overcapacity* pada Lapas/Rutan
  - Redistribusi WBP berdasar klasifikasi UPT dengan batasan pidananya dan pemetaan dengan berdasar pada batas kemampuan UPT.
  - Optimalisasi program reintegrasi sosial.
  - Optimalisasi penerapan *restorative justice* dan diversifikasi anak dengan APH.
  - Percepatan penanganan tahanan *overstaying*.
  - Mengusulkan pembangunan lapas baru dan melakukan penataan ulang blok hunian dalam upaya menambah kapasitas hunian.

- **IMIGRASI**

- Strategi peningkatan pelayanan publik dengan *Eazy Passport* dan *Eazy Intal*, Klinik Kekayaan Intelektual, Pelayanan Perseroan Perorangan pada Mall Pelayanan Publik, serta *Reward* dan *Punishment* kepada Organisasi Pemberi Bankum.

- Jumlah orang asing di Jawa Timur sebanyak 16.840 orang dengan rincian sebanyak 6.734 orang memiliki izin tinggal sebagai pekerja/TKA, dan sebanyak 10.106 orang sebagai keluarga/pendamping.

#### **IV. PENJELASAN KETUA PENGADILAN TINGGI SURABAYA**

##### **1. BIDANG ANGGARAN**

- **Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023**

Pagu anggaran tahun 2023 untuk DIPA 01 Pengadilan Tinggi Surabaya sebesar Rp308.771.807.000 dengan realisasi Rp279.724.394.151 (90,59%) dan untuk DIPA 03 Pengadilan Tinggi Surabaya sebesar Rp7.115.381.000 dengan realisasi Rp6.553.828.636 (92,11%).

- **Kebutuhan Anggaran**

- Renovasi gedung PT Surabaya sebelah utara yang digunakan sebagai ruang arsip dan ruang Kepaniteraan Hukum sebesar Rp5.000.000.000.
- 10 unit PC untuk optimalisasi pelayanan PN Surabaya sebesar Rp150.000.000.
- Renovasi gedung kantor PN Bojonegoro sebesar Rp10.000.000.000.
- 10 unit PC untuk optimalisasi pelayanan PN Tuban sebesar Rp150.000.000.
- Rehap gedung kantor PN Lamongan sebesar Rp250.000.000.
- 10 unit PC untuk optimalisasi pelayanan PN Gresik sebesar Rp150.000.000.
- Pembangunan gedung kantor baru PN Sidoarjo sebesar Rp36.000.000.000.
- Renovasi 3 rumah dinas PN Mojokerto sebesar Rp600.000.000.
- 10 unit PC untuk optimalisasi pelayanan PN Jombang sebesar Rp150.000.000.
- Pemeliharaan kendaraan roda 4 dan gedung kantor PN Bondowoso sebesar Rp400.000.000.
- Kebutuhan komputer PC 5 unit, printer 5 unit, scanner 3 unit, dan kain laken hijau 50 meter PN Jember sebesar Rp150.000.000.
- 10 unit PC untuk optimalisasi pelayanan PN Banyuwangi sebesar Rp150.000.000.
- 10 unit PC untuk optimalisasi pelayanan PN Situbondo sebesar Rp150.000.000.
- Pengadaan printer dan komputer PN Kediri sebesar Rp150.000.000.
- Pemeliharaan kendaraan dinas R4 PN Nganjuk sebesar Rp23.105.000.



- Anggaran untuk renovasi gedung dan pemeliharaan instalasi jaringan listrik PN Tulungagung sebesar Rp2.500.000.000.
- Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya PN Trenggalek sebesar Rp635.040.000.
- Belanja pegawai PN Blitar Rp170.000.000.
- Anggaran untuk pembelian hardisk server PN Malang Rp38.000.000.
- Genset, AC standing, meubelair ruang rapat, monitor ruang sidang dan ruang rapat, serta kendaraan dinas PN Pasuruan sebesar Rp500.000.000.
- Renovasi gedung kantor PN Probolinggo sebesar Rp10.000.000.000.
- Anggaran untuk belanja modal pengadaan peralatan dan mesin berupa PC, printer, dan scanner PN Lumajang sebesar Rp150.000.000.
- Kebutuhan anggaran untuk renovasi perluasan gedung kantor dan tempat parkir kendaraan roda 4 PN Bangil sebesar Rp2.950.000.000.
- Renovasi gedung kantor PN Kraksaan sebesar Rp10.000.000.000.
- 10 unit PC untuk optimalisasi pelayanan PN Madiun Rp150.000.000.
- 10 unit PC untuk optimalisasi pelayanan PN Ponorogo Rp150.000.000.
- 10 unit PC untuk optimalisasi pelayanan PN Pacitan Rp150.000.000.
- Biaya sewa rumah dinas hakim dan pemeliharaan atap gedung PN Ngawi sebesar Rp80.000.000.
- 10 unit PC untuk optimalisasi pelayanan PN Magetan sebesar Rp150.000.000.
- 10 unit PC untuk optimalisasi pelayanan PN Pamekasan sebesar Rp150.000.000.
- Belanja modal kendaraan dinas roda 2 PN Sumenep sebesar Rp25.000.000.
- Ruang tunggu sidang difabel dan laptop untuk operator PN Bangkalan sebesar Rp100.000.000.
- Pembelian AC PN Sampang sebesar Rp50.000.000.
- UPS 2 unit, server 1 unit, laptop 5 unit, dan PC 5 unit PN Kabupaten Kediri sebesar Rp150.000.000.
- 4 PC unit, 5 printer, 4 laptop, dan 2 scanner PN Kabupaten Madiun sebesar Rp261.500.000.
- Belanja modal peralatan dan mesin (AC standing), mesin komputer 6 buah, meubelair (bangku panjang besi sebanyak 24 buah), kendaraan dinas (mobil dinas 1 buah), dan printer 6 buah PN Kapanen sebanyak Rp200.000.000.

## **2. BIDANG PENGAWASAN**

- **Perkara yang Menonjol**

Perkara yang telah ditangani oleh Pengadilan Tinggi Surabaya sepanjang tahun 2023 antara lain pidana sebanyak 1.520 kasus, pidana anak 38 kasus, perdata 814 kasus, dan tipikor 84 kasus.

- **Perkara yang telah BHT namun Belum Dieksekusi**

Perkara yang telah BHT namun belum dieksekusi oleh Pengadilan Tinggi Surabaya sepanjang tahun 2023 antara lain pidana sebanyak 140 kasus, pidana anak 1 kasus, perdata 41 kasus, dan tipikor 1 kasus.

- **Hambatan Pelaksanaan Eksekusi**

Kehadiran pihak dalam persidangan perkara perdata (banyaknya jumlah pihak dalam satu perkara perdata, pihak beralamat di luar kota/provinsi/luar pulau, pihak tidak diketahui alamatnya) sehingga persidangan ditunda karena pihak-pihak tidak lengkap hadir.

## **V. PENJELASAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

### **1. BIDANG ANGGARAN**

- **Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023**

Pagu anggaran tahun 2023 untuk DIPA 01 sebesar Rp275.407.085.000 dengan realisasi sebesar Rp262.919.229.266 (95,47%) dan DIPA 04 sebesar Rp4.836.460.000 dengan realisasi Rp4.603.572.542 (95,19%).

- **Kebutuhan Anggaran**

- Pengadaan tanah, pembangunan, dan renovasi gedung kantor Pengadilan Agama di Jawa Timur.
- Pengadaan peralatan dan mesin Pengadilan Agama di Jawa Timur.
- Pembuatan jalur disabilitas pada Pengadilan Agama di Jawa Timur.
- Penambahan pagu program prioritas untuk pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

### **2. BIDANG PENGAWASAN**

- **Perkara Tahun 2023**

- Perkara banding yang masuk selama tahun 2023 adalah sebanyak 469 perkara dengan perkara putus sebanyak 452 perkara.

- Perkara tingkat pertama yang masuk selama tahun 2023 adalah sebanyak 111.891 perkara dengan perkara putus sebanyak 99.065 perkara dan sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 4.760 perkara.

- **Perkara yang Menonjol**

No	Jenis Perkara	Total Perkara
1	Perceraian (Cerai Gugat dan Cerai Talak)	84.669
2	Dispensasi Kawin (Sebelum dan Sesudah UU No. 16 Tahun 2019)	12.497
3	Izin Poligami	143
4	Ekonomi Syariah	119

- **Permohonan dan Kendala Eksekusi**

Pada tahun 2023 terdapat sebanyak 38 permohonan eksekusi. Eksekusi yang belum selesai disebabkan beberapa alasan seperti proses pelaksanaan eksekusi lelang namun tidak ada pembeli, proses pelaksanaan eksekusi melalui Pengadilan Agama lain (delegasi), dan proses pelaksanaan eksekusi anak pada saat dilaksanakan kemudian anak dipindahkan di luar wilayah Pengadilan Agama yang bersangkutan (sehingga eksekusi gagal dilaksanakan).

## VI. PENJELASAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

### 1. BIDANG ANGGARAN

- **Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023**

Pagu anggaran tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk DIPA 01 sebesar Rp15.383.598.000 dengan realisasi sebesar Rp14.864.100.528 (96,62%) dan DIPA 05 sebesar Rp173.600.000 dengan realisasi sebesar Rp171.600.000 (98,85%).

- **Kebutuhan Anggaran**

- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi.
- Pengadaan AC split baru.
- Pengadaan mubelair 2 ruang sidang.
- Rehabilitasi dan renovasi gedung kantor menjadi gedung kantor terpadu satu pintu.
- Rehabilitasi dan renovasi rumah dinas ketua, wakil ketua, hakim tinggi, panitera dan sekretaris.
- Pembangunan ruang tamu terbuka untuk antrian tamu.

- Barrier gate/pintu portal otomatis.
- Pintu metal detektor untuk ruang sidang.
- APAR (Alat Pemadam Api Ringan) 3 kg dan 6 kg.

## 2. BIDANG PENGAWASAN

- **Data Perkara Tahun 2023**

No	Keterangan	Jumlah Perkara
1	Sisa Perkara Tahun 2022	14
2	Perkara Masuk Tahun 2023	180
3	Perkara Putus Tahun 2023	183
4	Perkara Cabut Tahun 2023	1
5	Perkara Tidak Lolos Dismisal Tahun 2023	0
6	Perkara Belum Diputus Tahun 2023	0
7	Perkara Banding Tahun 2023	0
8	Perkara Kasasi Tahun 2023	0
9	Perkara Peninjauan Kembali Tahun 2023	0
10	Permohonan Eksekusi	0

Perkara tahun 2023 didominasi oleh perkara pertanahan sebanyak 117 perkara dan perkara kepegawaian sebanyak 59 perkara.

- **Eksekusi Putusan yang telah BHT**

Jumlah perkara yang telah BHT pada tahun 2023 sebanyak 194 perkara, 184 perkara telah dieksekusi, 10 perkara belum dieksekusi.

- **Kendala Proses Eksekusi**

PTTUN Surabaya adalah Pengadilan Tingkat Banding yang berperan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama. Dalam perkara khusus dan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di PTTUN Surabaya telah masuk 2 perkara, namun sampai saat ini perkara tersebut belum BHT.

## VII. PENJELASAN KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

### 1. BIDANG ANGGARAN

- **Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023**

Pagu anggaran tahun 2023 untuk DIPA 01 sebesar Rp9.242.642.000 dengan realisasi sebesar Rp8.813.951.630 (95,36%) dan DIPA 05 sebesar Rp440.199.000 dengan realisasi sebesar Rp426.538.351 (96,90%).

- **Kebutuhan Anggaran**

- Pembangunan gedung Pengadilan Militer Tinggi IV-Makassar, renovasi gedung Pengadilan Militer III-14 Denpasar, penambahan anggaran untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis Kesekretariatan dan Kepaniteraan, pembangunan gedung arsip Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, dan penambahan anggaran untuk menambah bandwidth sebesar Rp10.412.490.000.
- Penambahan anggaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta anggaran sidang keliling sebesar Rp409.430.000.

### 2. BIDANG PENGAWASAN

- **Data Perkara**

Perkara	Sisa Perkara Tahun 2022	Perkara Masuk Tahun 2023	Perkara Putus	Perkara Sisa
Tingkat Pertama	11	24	32	2
Tingkat Banding	16	190	196	8

Perkara	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali
Upaya Hukum	206 sisa 8	0	0

- **Klasifikasi Perkara**

Perkara yang masuk ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama tahun 2023 sebanyak 241 perkara.

## VIII. PENJELASAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR

### 1. BIDANG ANGGARAN

- **Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023**

Pagu anggaran tahun 2023 BNNP Jawa Timur dan jajaran sebesar Rp56.460.710.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp50.187.925.119 atau sebesar 88,89%.

- **Kebutuhan Anggaran Tahun 2023**
  - Anggaran konseling sebanyak 500 orang x 8 kali konseling.
  - Anggaran untuk mengadakan pelatihan/peningkatan kemampuan bagi SDM lembaga rehabilitasi.
  - Penambahan sarana pendukung kegiatan pemberantasan edar gelap narkoba berupa mobil beserta alat *Direction Finder* (DF).
  - Penambahan anggaran terkait penyelidikan berbasis IT.
  - Dukungan tambahan peningkatan fasilitasi P4GN.
  - Pengadaan belanja modal peralatan informasi dan teknologi (IT) berupa LED Videotron indoor/outdoor, pengadaan kendaraan bermotor, perangkat pengolah data, dan peralatan perkantoran.

## 2. BIDANG PENGAWASAN

- **Capaian BNNP Jawa Timur dan BNNK Jajaran**  
 BNNP Jawa Timur dan BNNK jajaran berhasil menangkap 61 orang tersangka, 27 orang target, dan 57 realisasi. Barang bukti Narkoba yang berhasil diamankan berupa sabu-sabu seberat 3.490,65 gram, dan ganja seberat 18.299,55 gram. Sedangkan barang bukti non-Narkoba yang berhasil diamankan berupa kendaraan bermotor roda empat sebanyak 2 unit, kendaraan bermotor roda dua sebanyak 11 unit, tanah dan uang sebesar Rp29.367.000.
- **Penerapan dan Konsep *Restorative Justice* (RJ)**  
 Dari hasil pemeriksaan tim hukum dan tim medis dapat memberikan rekomendasi kepada penyidik polri maupun jaksa penuntut umum untuk melakukan penyelesaian proses penyidikan melalui *Restorative Justice* dimana kewenangan *Restorative Justice* itu sendiri ada pada penyidik maupun jaksa yang menangani perkara tersangka yang diduga penyalahgunaan narkoba. Pada tahun 2022, dari target 309 orang telah tercapai sebanyak 1.383 orang (448%). Pada tahun 2023 dari target awal sebanyak 304. Per tanggal 7 Desember 2023 telah tercapai sebanyak 1.169 orang (385%).
- **Jalur Peredaran Narkoba di Provinsi Jawa Timur**
  - **Jalur Darat**
    - Sabu: Malaysia – Batam – Jakarta – Surabaya – Madura – Pangkal Pinang – Malang.

- Sabu/Ganja: Jakarta – Surabaya – Malang.
  - Ganja: Medan – Jakarta – Surabaya.
  - Inex: Jakarta – Surabaya – Malang.
- **Jalur Udara**  
Pengiriman Narkotika dalam bentuk paket melalui Bandar Udara Juanda berasal dari Malaysia, Aceh, Batam, Medan, Pontianak, Jakarta, dan Malang.
  - **Jalur Perairan**  
Pengiriman Narkotika melalui Pelabuhan Laut Tanjung Perak Surabaya berasal dari Malaysia, Jakarta, Batam, Madura, Banjarmasin, Pontianak, dan Pangkal Pinang.
- **Upaya Pencegahan Peredaran Narkotika**  
Melakukan kerjasama dengan instansi penegak hukum terkait penindakan terhadap perilaku dan jaringan peredaran narkotika ilegal dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bea Cukai, dan Pomal.
  - **Program Desa Bersinar**
    - Kota Surabaya: Kelurahan Wonokromo, dan Kelurahan Jagir.
    - Kota Kediri: Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren.
    - Kabupaten Trenggalek: Desa Buluagung, Kecamatan Karang.
    - Kabupaten Sumenep: Desa Selopeng, Desa Nambakor, Desa Aeng Merah, Desa Medelen, dan Desa Karang Duak.

### **C. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan laporan data dan informasi dari seluruh rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI pada reses Masa Persidangan II Tahun 2023-2024 ke Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah terurai di atas dan berbagai titik fokus diskusi yang terjadi antara Tim dan Para Mitra Kerja di Provinsi Jawa Timur, maka terdapat beberapa pokok hal penting atau saran yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut:

1. Komisi III DPR RI mengapresiasi kinerja Polda Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Militer Surabaya serta Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur.

2. Komisi III DPR RI menerima penjelasan terkait kendala yang dihadapi dan usulan kebutuhan anggaran yang telah disampaikan oleh Para Mitra Kerja Komisi III di Provinsi Jawa Timur dan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Komisi III DPR RI mendukung Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Timur untuk bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum lainnya dalam upaya mengatasi permasalahan over-kapasitas WBP Lapas/Rutan di Provinsi Jawa Timur serta mendukung Kebijakan dalam pemenuhan hak WBP terkait Pemilu 2024.
4. Komisi III DPR RI mengapresiasi Kepolisian Daerah Jawa Timur atas pelaksanaan kegiatan kamtibmas dan penanganan kasus maupun kesiapan pengamanan dalam menghadapi Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Timur.
5. Komisi III DPR RI mengapresiasi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atas upaya pencegahan, penanganan, dan penanggulangan tindak pidana yang telah dilakukan, serta penerapan restorative justice yang baik di Provinsi Jawa Timur.
6. Komisi III DPR RI mendukung Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur untuk bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum lainnya dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan Narkotika, serta pelaksanaan program rehabilitasi bagi penyalah guna Narkotika di Provinsi Jawa Timur.

Demikian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Jawa Timur untuk dapat menjadi masukan bagi Pimpinan dalam mengambil keputusan.

**Ketua Tim Kunjungan Kerja  
KOMISI III DPR RI,**

**Dr. Ir. H. ADIES KADIR, SH., M.Hum.**